JurnalIlmiahAdministratie
P-ISSN 2354-659XE-ISSN 2722-8185
Vol. 27 No. 2 September 2026, Hal.1-12

Analisis Potensi Wilayah Perbatasan Entikong-Sarawak untuk Mendukung Program Transmigrasi di Kalimantan Barat

Roma Tressa [a.1*], Nur Faizah [b.2], Azizah Larasati [c.3], Joshua Fernando [d.4], Andi Supiyandi [e.5]

[1]Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Tanjungpura, Jl.H. HadariNawawi, Pontianak, Kalimantan Barat. 78124. [2]Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang [3]Prodi Antropologi FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat [4-5]Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat
Email: [1]roma.tressa@fisip.untan.ac.id, [2]faizabrida@semarangkota.go.id, [3]Azizah.larasati@fisip.untan.ac.id, [4]joshua.fernando@fisip.untan.ac.id, [5] andi.supiyandi@fisip.untan.ac.id
Korespondensi: roma.tressa@fisip.untan.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima:02-09-26
Disetujui:09-09-26

Kata Kunci:

Pembangunan
Perbatasan
Transmigrasi
Strategi
Tata Kelola

Keyword:
Development
Borderland
Transmigration
Strategic
Governance

ABSTRAK

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensiwilayah Entikong untuk mendukung Transmigrasi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi dokumen *(documentary research)*. Data bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan dan kebijakan, laporan kelembagaan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis melalui sintesis dokumen dan analisis SWOT yang dilanjutkan dengan penyusunan matriks IFAS dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan memiliki kekuatan pada posisi geografis strategis, keberadaan PLBN Entikong, aktivitas perdagangan lintas batas, potensi pertanian dan perkebunan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, kawasan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketergantungan terhadap produk Malaysia. Nilai IFAS sebesar 2,75 dan EFAS sebesar 2,87 menempatkan kawasan pada Kuadran I dengan strategi pertumbuhan. Strategi prioritas diarahkan pada penguatan konektivitas Sekayam-Entikong, hilirisasi komoditas lokal, penguatan UMKM dan kelembagaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola perbatasan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan perlu menghubungkan Sekayam sebagai basis produksi dengan Entikong sebagai pusat perdagangan, pelayanan, dan logistik perbatasan.

Abstract:

This study aims to analyze the potential of the Entikong area in supporting transmigration development in the border region of West Kalimantan. The study employed a qualitative descriptive approach using a documentary research design. Data were obtained from publications of Statistics Indonesia, government planning and policy documents, institutional reports, and relevant previous studies. The data were analyzed through document synthesis and SWOT analysis, followed by the development of IFAS and EFAS matrices. The findings indicate that the area possesses several key strengths, including its strategic geographical location, the presence of the Entikong National Border Post (PLBN), active cross-border trade, agricultural and plantation potential, and strong government policy support. However, the area still faces several challenges, including inadequate infrastructure, limited downstream processing of local commodities, low human resource capacity, and dependence on Malaysian products. The IFAS score of 2.75 and the EFAS score of 2.87 place the area in Quadrant I, indicating a growth-oriented strategy. Priority strategies include strengthening Sekayam–Entikong connectivity, promoting downstream processing of local commodities, strengthening MSMEs and local economic institutions, improving human resource quality, and enhancing collaborative and sustainable border governance. Regional development should therefore strengthen the linkage between Sekayam as a production base and Entikong as a center for cross-border trade, services, and logistics.

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional (Putra & Rahmi, 2024) baik sebagai batas negara maupun sebagai ruangberlangsungnya aktifitas politik, ekonomi, dan interaksi lintas negara(Hochmüller & Idler, 2025). Dalam perspektif pembagunan wilayah, perbatasan merupakan ruang yang dibentuk melalui hubungan antara masyarakat, kelembagaan, kebijakan dan berbagai aktifitas perdagangan yang berlangsung secara dinamis (Gazzotti et al., 2023; OECD, 2024), sehingga membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan kerja sama multi pihak (Tressa & Yohanes, 2026). Salah satu instrumen pembangunan yang memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut adalah transmigrasi di kawasan perbatasan.

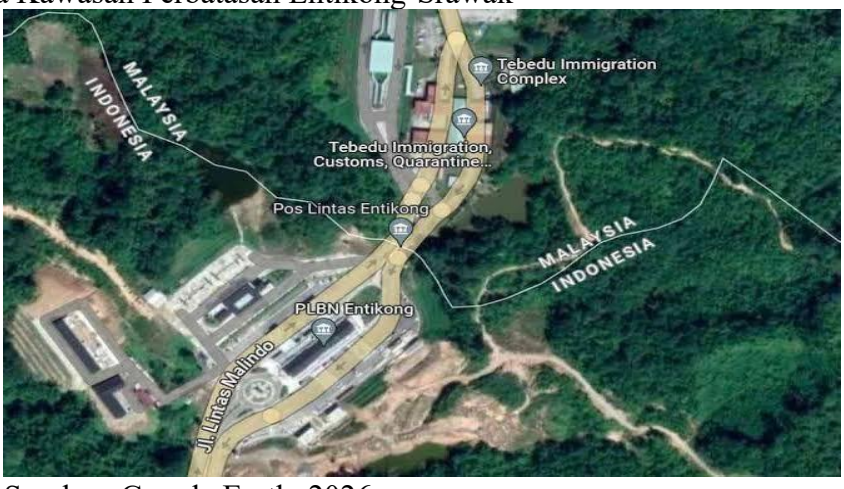
Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan permukiman. Kawasan transmigrasi dapat berperan dalam memperkuat struktur ekonomi wilayah, membuka akses terhadap wilayah yang relatif terisolasi, meningkatkan pemanfaatan potensi lokal, memperkuat konektivitas antardesa dan pusat pertumbuhan, serta mendukung keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat, sebagaimana fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang merepresentasikan wajah pembangunan nasional (Fitriasari, 2022; Sudagung & Alunaza, 2020).

Salah satu wilayah di Kalimantan Baratyang ditetapkan sebagai salah satu kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah Sekayam Entikong.Posisi ini menunjukkan bahwa Sekayam Entikong memiliki nilai strategis dalam kebijakan pembangunan transmigrasi nasional. Berdasarkan pengukuran Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi (INTRANS), Sekayam Entikong memperoleh nilai 43,41 dan masih dikategorikan sebagai kawasan berkembang, sehingga masih diperlukan intervensi pembangunan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan.

Secara kewilayahan, kawasan transmigrasi Sekayam-Entikong memiliki karakter yang khas karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan Sekayam memiliki luas sekitar 841,01 km², sedangkan Kecamatan Entikong memiliki luas sekitar 506,89 km² (BPS Kabupaten Sanggau, 2025). Dalam struktur kawasan tersebut, kegiatan transmigrasi aktif berada di SP Pugar Sungai Beruang, Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, sementara Kecamatan Entikong memiliki fungsi strategis sebagai pintu gerbang perbatasan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Kegiatan pemberdayaan di SP Pugar Sungai Beruang hingga tahun 2025 masih diarahkan pada pemanfaatan lahan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan komoditas pertanian.

Posisi strategis Entikong juga terlihat dari adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Sarawak, Malaysia dan berkembang sebagai kawasan perdagangan dan jasa lintas batas sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada PKSN Entikong, Nanga Badau, dan Paloh-Aruk.

Gambar 1. Peta Kawasan Perbatasan Entikong-Srawak



Sumber: Google Earth, 2026

Hasil identifikasi permasalahan pembangunan di kawasan Entikong menunjukkan bahwa meskipun Entikong berada di posisi strategis, namun masih ada ketimpangan antara wilayah pusat perbatasan dengan wilayah hinterland seperti kualitas infrastruktur, pembangunan manusia, dan investasi antardaerah (Azim Nabil, 2022). Artinya bahwa pertumbuhan tidak selalu menghasilkan pemerataan pembangunan wilayah (Saepulloh et al., 2025).

Modernisasi kawasan inti seperti PLBN seringkali menciptakan ketimpangan dengan wilayah hinterland di sekitarnya (Putra & Salim,2022). Pada sisi lain, masyarakat masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap produk dan kebutuhan pokok dari Sarawak (Ega Alphard et al., 2024;Setiawan et al., 2025).Selain itu pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam juga menghadirkan tantangan keberlanjutan lingkungan. aktivitas pembukaan lahan perkebunan dan eksploitasi hasil hutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem kawasan perbatasan (Bambang Wibowo et al., 2021), serta kerentanan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor (Utomo et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola publik yang transparan dan berkelanjutan (Tressa, 2025)untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan perbatasan.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang kawasan perbatasan lebih banyak menyoroti aspek keamanan(Donko et al., 2022; Ramayansyah & Febriadi, 2025; Rokhaniyah & Nazaruddin Noor, 2023), mobilitaslintas negara (Thompson, 2022)dan ekonomi perdagangan formal (Amalia fitri, 2022). Sedangkan kajian wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan kawasan transmigrasi di Entikong masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pembangunan kawasan perbatasan, pusat pertumbuhan Entikong, sistem produksi lokal, konektivitas wilayah, dan perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi dokumen *(documentary research).* Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi, permasalahan, serta arah pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong sebagai kawasan transmigrasi yang berada pada wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.Penelitian tidak menggunakan data primer melalui wawancara, survei, maupun observasi lapangan, tetapi sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, data statistik, laporan kelembagaan, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dokumen digunakan karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara sistematis terhadap berbagai dokumen untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai fenomena yang diteliti (Bowen, 2009).

Sumber data meliputi publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dokumen dan regulasi mengenai pengembangan kawasan perbatasan dan kawasan transmigrasi, laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dokumen kementerian dan pemerintah daerah terkait pengembangan Sekayam–Entikong, serta artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, kredibilitas sumber, kesesuaian wilayah kajian, serta kemampuannya memberikan informasi mengenai kondisi internal dan eksternal Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, seluruh dokumen diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Kedua, informasi yang berkaitan dengan kondisi geografis, sumber daya alam, kegiatan ekonomi, perdagangan lintas batas, infrastruktur dan pelayanan publik, sumber daya manusia, lingkungan, tata kelola, serta kebijakan pembangunan kawasan dikumpulkan dalam matriks data. Ketiga, data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan kawasan. Keempat, informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dokumen, khususnya antara data statistik pemerintah, dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan temuan penelitian terdahulu. Hasil sintesis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan faktor strategis dalam analisis SWOT.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), serta faktor eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong. Penentuan masing-masing faktor SWOT dilakukan berdasarkan sintesis bukti yang ditemukan secara konsisten dalam dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Faktor-faktor tersebut kemudian disusun ke dalam matriks SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi SO (strength–opportunity), WO (weakness–opportunity), ST (strength–threat), dan WT (weakness–threat).

Untuk menentukan posisi strategis kawasan, faktor-faktor SWOT selanjutnya dianalisis menggunakan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFAS).

Setiap faktor diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap pengembangan kawasan, dengan total bobot masing-masing matriks sebesar 1,00. Rating diberikan menggunakan skala 1–4 untuk menunjukkan kondisi relatif masing-masing faktor berdasarkan hasil sintesis data sekunder. Skor tertimbang diperoleh dengan mengalikan bobot dengan rating setiap faktor. Karena penelitian tidak menggunakan panel ahli, penetapan bobot dan rating dilakukan melalui penilaian analitis peneliti berbasis bukti dokumenter, dengan mempertimbangkan konsistensi temuan antar-sumber, signifikansi faktor terhadap pembangunan kawasan, dan keterkaitannya dengan tujuan pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong. Hasil IFAS dan EFAS selanjutnya digunakan untuk menentukan posisi strategis kawasan dan merumuskan arah kebijakan pengembangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Potensi Wilayah Perbatasan Entikong-Sarawak

Secara administratif, Kecamatan Entikong berada di bawah wilayah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang menjadi salah satu symbol modernisasi kawasan perbatasan Indonesia. Dari sisi demografi, masyarakat Kecamatan Entikong terdiri atas berbagai kelompok etnis seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan suku lainnya. Suku Dayak merupakan kelompok masyarakat yang cukup dominan di wilayah pedalaman dan masih mempertahankan nilai-nilai budaya serta adat istiadat lokal (Larasati et al., 2026). Keberagaman etnis tersebut menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan menjadi salah satu potensi budaya daerah (Hildawati et al., 2025). Selain itu, masyarakat perbatasan juga memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang cukup kuat dengan masyarakat Malaysia karena adanya interaksi lintas batas yang berlangsung sejak lama.

Kawasan transmigrasi Sekayam termasuk dalam prioritas Nasional Program Transmigasi seluas 77.589.89 ha, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui produk unggulan komoditas beras, komoditas perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi dan perikanan. Kawasan transmigrasi ini memiliki Potensi jumlah SKP sebanyak 3 tempat dan potensi SP baru 4 tempat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau, Dinas Pariwisata Kabupaten Sanggau dan Hasil-hasil Penelitian Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit dan pertanian pangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah seperti pada table 1 berikut ini.

Tabel 1. Potensi pertanian dan perkebunan di Entikong Tahun 2023-2025

Tahun	Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Pendapatan/ Tahun	Keterangan
2025	Lada, kakao dan holtikultura	1.780 Ha	Rp27Miliar	Komoditas unggulan lokal berkembang
2024	Karet dan kelapa sawit	2.650 Ha	Rp 24 Miliar	Perkebunan utama Entikong
2023	Padi ladang, jagung, holtikuktura	1.350 Ha	Rp 21 Miliar	Pertanian pangan masyarakat lokal

Sumber: BPS Kab.Sanggau, dan hasil Penelitian Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, 2026

Berdasarkan Tabel 1 tersebut terlihat bahwa komoditas utama yang berkembang diwilayah ini meliputi padi ladang, jagung, hortikultura, karet, kelapa sawit, lada, dan kakao, didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas serta posisi strategis wilayah perbatasan yang membuka peluang pemasaran hingga ke Malaysia melalui perdagangan lintas batas. Aktivitas keluar-masuk barang dan jasa antarnegara menjadikan Entikong sebagai kawasan dengan mobilitas ekonomi yang cukup tinggi. Perdagangan lintas batas ini mencakup kebutuhan pokok, hasil pertanian, barang konsumsi, hingga jasa transportasi dan logistik.

Tabel 2. Potensi aktifitasperdagangan di EntikongTahun 2023-2025

Tahun	Aktivitas Perdagangan	Pendapatan/	Keterangan

	Dominan	tahun	
2025	Perdagangan lintas batas dan UMKM	Rp 44 miliar	Ekonomi perbatasanberkembang
2024	Distribusi barang dan jasa logistik	Rp 38 miliar	Mobilitas PLBN meningkat
2023	Kebutuhanpokok dan hasil pertanian	Rp 32 miliar	Pemulihan ekonomi pasca pandemi

Sumber: BPS Kab. Sanggau, dan hasil Penelitian Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, 2026

Tabel 2 Tersebut menjelaskan bahwa aktifitas perdagangan di perbatasan Entikong memberikan dampak ekonomi yang signifikan selama tiga tahun terakhir melalui perdagangan lintas batas dan UMKM, distribusi barang dan jasa, serta distribusi kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian.

Tabel 3. Potensi Hasil Hutan di Entikong Tahun2023-2025

Tahun	Jenis Hasil Hutan Domninan	Luas Kawasan /Pemanfaatan	Pendapatan/ Tahun	Keterangan
2025	Rotan, maduhutan, tanaman obat	1.400 Ha	Rp13miliar	Ekonomi hasil hutan berkembang
2024	Madu hutan & hasil non kayu	1.250Ha	Rp11 miliar	Permintaan pusat meningkat
2023	Rotan dan bambu	1.100Ha	Rp 9miliar	Dimanfaatkan masyarakat lokal

Sumber: BPS Kab. Sanggau, dan Hasil-hasil PenelitianPengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, 2026

Berdasarkan Tabel 3, pendapatan sektor hasil hutan Kecamatan Entikong tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar Rp 9 miliar/tahun dan meningkat menjadi Rp11 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp13 miliar/tahun seiring meningkatnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan pengembangan usaha masyarakat berbasis sumber daya hutan. Sedangkan produk unggulan daerah di Entikong umumnya berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kerajinan masyarakat seperti lada, karet rakyat, kelapa sawit, hortikultura, madu hutan, anyaman rotan, kerajinan khas Dayak, dan produk olahan pangan seperti kripik dan makanan khas Dayak.Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong juga dapat menjadi daya tarik wisata karena merupakan ikon kawasan perbatasan Indonesia.

Sektor pariwisata juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, pengembangan pariwisata juga dapat memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan citra Entikong sebagai kawasan strategis perbatasan Indonesia.Suku Dayak merupakan kelompok masyarakat yang cukup dominan di wilayah pedalaman dan masih mempertahankan nilai-nilai budaya serta adat istiadat lokal. Keberagaman etnis tersebut menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan menjadi salah satu potensi budaya daerah. Selain itu, masyarakat perbatasan juga memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang cukup kuat dengan masyarakat Malaysia karena adanya interaksi lintas batas yang berlangsung sejak lama.

Selain itu, dalam perspektif *Growth Pole Theory* (Komarovskiy & Bondaruk, 2013), pembangunan infrastruktur strategis seperti PLBN dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang mendorong aktivitas ekonomi wilayah sekitarnya (Rusdiono et al., 2024). Keberadaan PLBN Entikong telah meningkatkan mobilitas perdagangan lintas batas, distribusi barang, jasa logistik, dan aktivitas sosialekonomi masyarakat(Yosada, 2020). Selain itu, wilayah Entikong juga memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata yang berpotensi menjadi basis penguatan ekonomi lokal. Selain itu, kawasan transmigrasi Sekayam Entikong dengan status kawasan berkembang juga memberikan kontribusi melalui produk unggulannya. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya memiliki fungsi geopolitik, tetapi juga nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional (Cuttitta et al., 2023).

AnalisisPotensi Wilayah Perbatasan Entikong-Sarawak dengan SWOT

Tabel 5. Analisis SWOT Potensi Wilayah Entikong

Faktor	Positif	Negatif
Internal	***Strenght (S)*** **S1.** Letak geografis strategis sebagai jalur perdagangan internasional Indonesia-Malaysia. **S2.** Keberadaan Pos Lintas Batas Negara Entikong yang modern dan menjadi pusat aktivitas lintas batas. **S3.** Potensi perdagangan lintas negara cukup tinggi. **S4.** Memiliki potensi sumber daya alam seperti hasil pertanian dan kehutanan. **S5.** Mendapat dukungan pemerintah sebagai kawasan strategis nasional.	***Weakness (W)*** **W1.** Infrastrukturpendukungbelum merata di seluruh wilayah. **W2.** Ketergantungan masyarakat terhadap produk dari Malaysia. **W3.** Pengolahan hasil produksi lokal masihterbatassehingganilaitambah rendah. **W4.** Akses pelayanan publik terbatasdibeberapa daerah sekitar perbatasan. **W5.** Angka kemiskinan di wilayah perbatasan. **W6.**Keterbatasan SDM
Eksternal	***Opportunities (O)*** **O1**. Adanya peluang kerjasama ekonomi IndonesiadenganMalaysia. **O2.** Peluang investasi pada sektor perdagangan,logistik,dan pariwisata perbatasan. **O3.** Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan perdagangan bebas. **O4.** Perkembangan teknologi digital yang mendukung pemasaran produk lokal. **O5.** Dukungan program pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan.	***Threats (T)*** **T1.**Persaingan produk Malaysia yang lebih unggul dari segi kualitas dan harga. **T2.**Aktivitas penyelundupan barang dan tenaga kerja ilegal. **T3.** Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga. **T4.** Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. **T5.** Perubahan kebijakan perdagangan Internasional yang dapat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah.

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan data sekunder, 2026.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT pada tabel 5 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Strategi SO (*Strength–Opportunities*)**

   Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang eksternal yang tersedia.
   SO1. Mengembangkan Entikong sebagai pusat perdagangan dan logistik internasional berbasis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.
   SO2. Meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia melalui pengembangan perdagangan lintas batas dan investasi kawasan perbatasan.
   SO3. Mengembangkan sektor pariwisata perbatasan berbasis budaya Dayak dan wisata alam dengan dukungan infrastruktur strategis.
   SO4. Memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk unggulan daerah seperti lada, madu hutan, kerajinan rotan, dan produk UMKM lokal.
   SO5. Mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan strategis nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

2) **Strategi WO (*Weakness–Opportunities*)**
   Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan internal wilayah.

WO1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

WO2. Memanfaatkan program pembangunan pemerintah untuk memperluas infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan hingga desa pedalaman.

WO3. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar produk lokal memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

WO4. Mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi lokal melalui akses permodalan, teknologi, dan pemasaran digital.

WO5. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk Malaysia dengan memperkuat produksi dan distribusi produk lokal.

3) **Strategi ST (*Strength–Threats*)**

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal.

ST1. Memperkuat pengawasan kawasan perbatasan melalui sinergi pemerintah, TNI, Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi guna mencegah aktivitas ilegal lintas negara.

ST2. Memanfaatkan posisi strategis Entikong untuk meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk Malaysia.

ST3. Mengembangkan sistem perdagangan perbatasan yanglebih teratur dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga.

ST4. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

ST5. Memanfaatkan keberadaan PLBN dan infrastruktur nasional untuk memperkuat stabilitas ekonomi kawasan perbatasan.

4) **Strategi WT (*Weakness–Threats*)**

Strategi ini dilakukan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang dapat menghambat pembangunan wilayah.

WT1. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah guna mengurangi kesenjangan antara pusat perbatasan dan desa pedalaman.

WT2. Memperkuat pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas ilegal yang dapat merusak lingkungan kawasan perbatasan.

WT3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

WT4. Mengembangkan kebijakan ekonomi lokal yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat perbatasan.

WT5. Meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan kawasan perbatasan agar pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Analisis IFAS digunakan untuk menilai kondisi internal Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong melalui identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor terhadap pengembangan kawasan, dengan total bobot sebesar 1,00. Rating menggunakan skala 1–4, yaitu 4 menunjukkan kekuatan utama, 3 menunjukkan kekuatan moderat, 2 menunjukkan kelemahan moderat, dan 1 menunjukkan kelemahan utama. Skor tertimbang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating.

Tabel 6. Internal Factor Analysis Summary (IFAS) Entikong

Faktor Internal	**Bobot**	**Rating**	**Score**
Strenght			
Posisi geografis strategis pada jalur perbatasan Indonesia-Malaysia	0.12	4	0.48
PLBN Entikong sebagai simpul utama aktivitas lintas batas	0.11	4	0.44
Aktivitas perdagangan lintas batas yang relatif aktif	0.10	3	0.40
Potensi pertanian, perkebunan, dan hasil hutan	0.10	3	0.30
Dukungan pemerintah sebagai kawasan strategis dan kawasan transmigrasi prioritas	0.09	3	0.27

Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Strenght			
Sub Total Kekuatan	0.52		1.98
Weakness			
Infrastruktur pendukung belum merata hingga wilayah hinterland	0.11	2	0.22
Ketergantungan terhadap sejumlah produk dari Malaysia	0.09	2	0.18
Hilirisasi dan pengolahan hasil produksi lokal masih terbatas	0.10	1	0.10
Akses terhadap pelayanan publik masih terbatas pada sebagian wilayah	0.07	2	0.14
Permasalahan kemiskinan masyarakat	0.05	2	0.10
Keterbatasan kualitas sumber daya manusia	0.06	2	0.12
Sub Total Kelemahan	0.48		0.86
Total IFAS	1.00		2.75

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan data IFAS, 2026.

Hasil analisis IFAS menunjukkan total skor tertimbang sebesar 2,75. Nilai tersebut berada di atas nilai tengah 2,50, yang menunjukkan bahwa kondisi internal Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong relatif cukup kuat dalam mendukung pengembangan kawasan. Kekuatan internal menghasilkan skor sebesar 1,89, lebih tinggi dibandingkan skor kelemahan sebesar 0,86.

Kekuatan utama kawasan berasal dari posisi geografis strategis pada koridor perbatasan Indonesia–Malaysia dengan skor 0,48, keberadaan PLBN Entikong dengan skor 0,44, serta aktivitas perdagangan lintas batas dengan skor 0,40. Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa posisi perbatasan dan konektivitas lintas negara merupakan modal utama dalam pengembangan kawasan. Potensi pertanian, perkebunan, dan hasil hutan serta dukungan pemerintah terhadap kawasan strategis dan transmigrasi juga memperkuat basis pengembangan ekonomi wilayah.

Meskipun demikian, kawasan masih menghadapi sejumlah kelemahan. Infrastruktur yang belum merata memperoleh skor 0,22, sedangkan ketergantungan terhadap sejumlah produk Malaysia memperoleh skor 0,18. Persoalan yang paling penting adalah masih terbatasnya hilirisasi dan pengolahan hasil produksi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dan aktivitas produksi belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah ekonomi di dalam kawasan. Keterbatasan pelayanan publik, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong.

Dengan demikian, skor IFAS sebesar **2,75** menunjukkan bahwa kawasan memiliki modal internal yang cukup kuat, tetapi pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pemerataan infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan hilirisasi komoditas agar posisi strategis kawasan perbatasan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi wilayah transmigrasi dan hinterland.

ExternalFactor Analysis Summary (EFAS)

Analisis EFAS digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang memengaruhi pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor dengan total bobot sebesar 1,00. Rating menggunakan skala 1–4, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi eksternal yang semakin mendukung pengembangan kawasan, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan faktor ancaman yang perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 7. External Factor Analysis Summary (EFAS) Entikong

Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Opportunities			
Peluang kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia	0.12	4	0.48

Peluang investasi sektor perdagangan, logistik, dan pariwisata	0.11	4	0.44
Peluang pengembangan kawasan ekonomi dan perdagangan perbatasan	0.09	3	0.27
Perkembangan teknologi digital untuk pemasaran produk lokal	0.08	3	0.24
Dukungan program pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan dan transmigrasi	0.12	4	0.48
Subtotal Peluang (O)	0.52		1.91
Threats			
Persaingan produk Malaysia dari sisi harga dan kualitas	0.11	2	0.22
Aktivitas penyelundupan dan mobilitas ilegal lintas batas	0.09	2	0.18
Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga	0.10	2	0.20
Risiko eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan	0.10	2	0.20
Perubahan kebijakan perdagangan internasional dan lintas batas	0.08	2	0.16
Subtotal Ancaman (T)	0.48		0.96
Total EFAS	1.00		2.87

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan data EFAS, 2026.

Hasil analisis EFAS menunjukkan total skor tertimbang sebesar 2,87, berada di atas nilai tengah 2,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lingkungan eksternal relatif memberikan peluang yang mendukung pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong. Total skor peluang sebesar 1,91, sedangkan skor ancaman sebesar 0,96, sehingga peluang eksternal relatif lebih dominan dibandingkan ancaman yang dihadapi kawasan.Peluang utama berasal dari kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia dan dukungan program pemerintah pusat yang masing-masing memperoleh skor 0,48. Posisi Sekayam–Entikong sebagai kawasan transmigrasi perbatasan memberikan peluang untuk menghubungkan pembangunan kawasan transmigrasi dengan perdagangan lintas batas, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan pusat pertumbuhan Entikong. Peluang investasi pada sektor perdagangan, logistik, dan pariwisata juga memiliki pengaruh besar dengan skor 0,44. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi perbatasan dan pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi peningkatan pemasaran dan daya saing produk lokal.

Di sisi lain, kawasan menghadapi sejumlah ancaman eksternal. Persaingan produk Malaysia memperoleh skor 0,22, sedangkan ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga dan risiko eksploitasi sumber daya alam masing-masing memperoleh skor 0,20. Aktivitas ilegal lintas batas serta perubahan kebijakan perdagangan internasional juga dapat memengaruhi stabilitas aktivitas ekonomi kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan wilayah perbatasan menghasilkan peluang ekonomi yang besar, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kompetisi produk, ketergantungan ekonomi, aktivitas ilegal, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Secara keseluruhan, skor EFAS sebesar **2,87** menunjukkan bahwa Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong memiliki lingkungan eksternal yang relatif mendukung untuk dikembangkan. Pemanfaatan peluang tersebut perlu diarahkan pada penguatan keterhubungan antara kawasan transmigrasi sebagai basis produksi dengan Entikong sebagai simpul perdagangan dan pelayanan perbatasan, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal dan mengendalikan berbagai risiko eksternal.

StrategiKebijakanPembangunan Kawasan PerbatasanEntikong-Sarawak

Hasil analisis IFAS menunjukkan skor sebesar 2,75, sedangkan hasil analisis EFAS memperoleh skor 2,87. Selisih antara kekuatan dan kelemahan menghasilkan nilai sumbu internal sebesar +1,03, sedangkan selisih peluang dan ancaman menghasilkan nilai sumbu eksternal sebesar +0,95. Posisi tersebut menempatkan Kawasan Transmigrasi Sekayam–Entikong pada Kuadran I, yang menunjukkan bahwa kawasan memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang relatif dominan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kawasan perlu berorientasi pada strategi pertumbuhan (growth-oriented strategy) dengan mengoptimalkan posisi strategis wilayah perbatasan, keberadaan PLBN Entikong, aktivitas perdagangan lintas batas, potensi sumber daya lokal, serta dukungan kebijakan pemerintah.

1. Penguatan Pertumbuhan Berbasis Konektivitas Perbatasan dan Potensi Lokal.Arah kebijakan pertama adalah memperkuat keterhubungan antara kawasan transmigrasi Sekayam sebagai basis produksi dengan Entikong sebagai simpul perdagangan, pelayanan, dan logistik perbatasan. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan distribusi komoditas, peningkatan konektivitas jalan produksi menuju pusat perdagangan, penyediaan fasilitas logistik, serta penguatan pasar bagi produk pertanian, perkebunan, dan UMKM lokal. Dengan pola tersebut, keberadaan PLBN Entikong tidak hanya berfungsi sebagai pintu perlintasan negara, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kawasan hinterland. Kemudian mengoptimalkan kerja sama ekonomi Indonesia–Malaysia untuk memperluas pasar produk lokal**.** Kedekatan dengan Tebedu, Sarawak, dapat dimanfaatkan melalui fasilitasi perdagangan formal, pengembangan jejaring pelaku usaha, promosi produk lokal, serta penguatan standar mutu produk agar mampu bersaing di pasar lintas batas. Dukungan teknologi digital juga dapat digunakan untuk memperluas pemasaran produk UMKM dan komoditas unggulan kawasan.
2. Penguatan Infrastruktur, Hilirisasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Kebijakan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada pemerataan konektivitas dari pusat pertumbuhan Entikong menuju kawasan transmigrasi dan desa-desa hinterland. Selain pembangunan fisik, diperlukan penguatan sumber daya manusia berbasis kebutuhan ekonomi kawasan.
3. Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Tata Kelola Perbatasan. Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas, efisiensi produksi, standardisasi, pengemasan, sertifikasi, dan kontinuitas pasokan. Posisi strategis PLBN dan dukungan kebijakan pemerintah harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi produk Sekayam–Entikong di pasar lokal maupun lintas batas.Penguatan tata kelola perbatasan juga diperlukan melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP, Bea Cukai, Imigrasi, aparat keamanan, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Kebijakan pemerataan pembangunan berbasis konektivitas kawasan, sehingga investasi dan pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di Entikong. Program pembangunan harus memperkuat hubungan ekonomi antara Sekayam, Entikong, kawasan transmigrasi, sentra produksi, pusat pelayanan, dan pasar.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan PLBN Entikong, aktivitas perdagangan lintas batas, sumber daya pertanian dan perkebunan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Hasil analisis IFAS sebesar 2,75 dan EFAS sebesar 2,87 menempatkan kawasan pada Kuadran I, sehingga strategi pengembangannya diarahkan pada growth-oriented strategy. Pengembangan kawasan perlu menekankan keterhubungan antara Sekayam sebagai basis produksi dengan Entikong sebagai pusat perdagangan, pelayanan, dan logistik perbatasan melalui penguatan konektivitas, hilirisasi komoditas lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta tata kelola perbatasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Sekayam–Entikong tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kawasan inti, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi kawasan transmigrasi dan wilayah hinterland.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia fitri. (2022). Ekonomi Pembangunan. *Widina Bhakti Persada Bandung*.

Azim Nabil, A. (2022). determinan-ketimpangan-pembangunan-ekonomi-antar-provinsi-di-indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 1–16.

Bambang Wibowo, E., Maarif, S., & Pramono, B. (2021). Collaborative Governance in border management policies to support national defense (a case study on the land border of West Kalimantan Province). In *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* (Vol. 12, Number 13).

Creswell, J. W. (2009). *Research Design*.

Cuttitta, P., Pécoud, A., & Phillips, M. (2023). Civil Society and Migration Governance across European Borderlands. In *Journal of Intercultural Studies* (Vol. 44, Number 1, pp. 1–11). Routledge. https://doi.org/10.1080/07256868.2022.2160099

Donko, K., Doevenspeck, M., & Beisel, U. (2022). Migration Control, the Local Economy and Violence in the Burkina Faso and Niger Borderland. *Journal of Borderlands Studies*, *37*(2), 235–251. https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1997629

Ega Alphard, M., Rekayasa Hernovianti, F., & Yuniarti, E. (2024). *Perubahan Tutupan Lahan Di Desa Entikong Akibat Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Entikong*.

Ersa Tri Fitriasari. (2022). *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Good Governance Di Provinsi Kalimantan Barat*. *3*, 22–31.

Fredi Mainassy, Eva Lisantri, & Sulviyani Suardi. (2026). Transformasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Laut sebagai Simpul Konektivitas Strategis dalam Kerangka BIMP-EAGA Vision 2035. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(1), 123–141. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1550

Gazzotti, L., Mouthaan, M., & Natter, K. (2023). Embracing complexity in 'Southern' migration governance. In *Territory, Politics, Governance* (Vol. 11, Number 4, pp. 625–637). Routledge. https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2039277

Hildawati, H., Rere Pauztio Noso, Lutfiah Lira Irwanti, Delta Nabilla Maharani, & Irwayuni, I. (2025). Air Serbat Sebagai Sumber Fitonutrien Tradisional Masyarakat Melayu Di Kota Pontianak. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, *4*(3), 426–437. https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.6665

Hochmüller, M., & Idler, A. (2025). Porous borders and the emergence of hybrid sovereignties. *Territory, Politics, Governance*, *13*(6), 847–866. https://doi.org/10.1080/21622671.2025.2488934

Komarovskiy, V., & Bondaruk, V. (2013). *The Role Of The Concept Of "Growth Poles" For Regional Development*.

Larasati, A., Fatmawati, & Arfalia, N. (2026). Membentuk Jaringan Ekonomi Lintas BatasBerbasis Sosial BudayaMasyarakat Perbatasan Indonesia Jagoi Babang dengan Serikin Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *15*(1), 75–84. https://doi.org/10.23887/jish.v15i1.105382

OECD. (2024). *Building More Resilient Cross-border Regions*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d5fd3e59-en

Putra, A., & Rahmi, K. (2024). Pembangunan Kawasan Perbatasan: Efektivitas Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut Di Kabupaten Bintan. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 7, Number 1).

Putra, R. D. W., & Salim, W. (2022). Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian. *TATALOKA*, *24*(3), 186–201. https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.186-201

Ramayansyah, S., & Febriadi, H. (2025). Analisa Efektifvitas Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Perdagangan Orang di Kawasan Perbatasan Nunukan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 1–10.

Rokhaniyah, H., & Nazaruddin Noor, M. I. (2023). *Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)*. *8*(4), 305–313.

Rusdiono, Sudagung, A. D., Linando, J. A., & Ningtias, K. (2024). Problems of Good Governance in Managing Indonesia's Borderland: The Case of Entikong Subdistrict. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *28*(1), 1–16. https://doi.org/10.22146/jsp.90704

Saepulloh, A., Uny, C., Mokobombang, S. R., & Joyodiningrat, M. H. (2025). Identifikasi Pola Core-Periphery Di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. *Kurvatek*, *10*(2). https://doi.org/10.33579/krvtk.v10i2.5708

Setiawan, I., Nawawi, N., Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, M., Sururama, R., & Kusmana, D. (2025). Village Development Model Of Growth Center In Border District In Sanggau Regency West Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(1), 59–73. https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.5262

Sudagung, A. D., & Alunaza, H. S. (2020). *Kebijakan Nawa Cita Sebagai Dasar Pembangunan Di Kawasan Perbatsan Kalimantan Barat*. *10*.

Thompson, D. K. (2022). Respatializing Federalism in the Horn's Borderlands: From Contraband Control to Transnational Governmentality. *Journal of Borderlands Studies*, *37*(2), 295–316. https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1943494

Tressa, R. (2025). *Birokrasi Dan Tata Kelola Publik*. www.freepik.com

Tressa, R. (2026). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Administrasi Publik Dan Lingkungan. *Penerbit Widina Media Utama*.

Tressa, R., & Yohanes, Y. (2026). Rethinking Collaborative Governance in Marine Conservation: Evidence of State Dominance in Randayan Island and Its Surrounding Waters in West Kalimantan. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, *8*(3), 1698–1706. https://doi.org/10.56338/ijhess.v8i3.11238

Utomo, B., Apriyanti, S., Hazizah, N., Akbar, A. A., Sudrajat, J., Gusmayanti, E., Zahara, R., Jati, D. R., & Mahdiyah, U. (2025). Utilizing Geographic Information Systems to Analyze Physical Conditions for Policymaking in Kapuas Hulu for Sustainable Development Goals. In *Science and Technology ISST* (Vol. 2024).

Wong Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2022). Cross-Border Integration, Cooperation and Governance: A Systems Approach for Evaluating "Good" Governance in Cross-Border Regions. *Journal of Borderlands Studies*, *37*(5), 1047–1070. https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855227

Yosada, K. R. (2020). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong*. *5*(2), 2020. http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/